

KAJIAN EUTHANASIA MENURUT HAM (STUDI BANDING HUKUM NASIONAL BELANDA)

Oleh : Pingkan K. Paulus¹

Abstrak

Legalization of euthanasia and physician assisted suicide has been heavily debated in many countries. Euthanasia when viewed in the perspective of human rights according to the counter is considered a human rights violation because it involves the right to life of the patient must be protected. Euthanasia caused a breach of human rights against the rights of human life because they deliberately shorten a person's life. However, in reality happens in practice euthanasia becomes a way out of a problem related to human life in this patient. The Netherlands became the first country to successfully make euthanasia legal and made them as a model to other countries to legalized euthanasia. Euthanasia has not been a criminal offence in Netherlands since 1984, when courts and the Royal Dutch Medical Associatuon drew up ten clearly defined guidelines and conditions for doctors.

A. PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup, termasuk didalamnya yaitu manusia akan mengalami dan melalui suatu proses siklus kehidupan. Siklus kehidupan tersebut dimulai dari proses pembuahan, proses kelahiran, lalu berlanjut kepada proses kehidupannya di dunia, dan siklus kehidupan manusia diakhiri dengan kematian. Semua siklus tersebut akan dialami oleh manusia dan tidak dapat dihindari. Kematian merupakan suatu proses siklus kehidupan manusia yang mengandung suatu misteri atau tanda tanya yang besar. Kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik, hal demikian tidak terjadi dalam dunia kedokteran dan kesehatan.²

Asal usul hakiki hak adalah kesadaran moral, hak-hak yang semata-mata atas dasar perintah kesadaran moral, yang disebut “hak alamiah” atau “asasi”. Tetapi menurut Jeremy Bentham dalam bukunya “*The Theory of Legislation*” yang dikutip Abussalam menyebutkan selain hak alamiah, ada pula hak yang “non alamiah”, atau “konvensional” yaitu hak yang tidak dihadirkan oleh kesadaran moral, namun lahir dari kesadaran bebas antara

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Denissa Ningtyas, *Euthanasia*, < <http://www.slideshare.net/densyaa/euthanesia>>, April 2012, diakses tanggal 28 Oktober 2012.

pemilik hak alamiah.³ Hak merupakan unsur yang melekat dalam diri manusia, yang merupakan unsur yang mendasar, sehingga dikenal dengan hak asasi manusia. Maka dari proses siklus kehidupan ini manusia mempunyai hak untuk bisa hidup, berkembang dan menjalani kehidupan di dunia serta juga mempunyai hak yang berkaitan dengan proses kematian. Oleh karena itu, dalam hal ini kematian merupakan hak asasi manusia juga karena berhubungan dengan hak hidup dari seseorang.

Hal tersebut diatas kemudian memunculkan suatu pro dan kontra yang berkaitan dengan kematian. Adanya pengakuan dan pengaturan mengenai hak hidup dalam hak asasi manusia sehingga menimbulkan kontroversi bilamana dikatakan bahwa kematian juga merupakan suatu hak dari manusia. Pada hakikatnya memang dalam hal menentukan kematian seseorang dalam suatu ilmu kedokteran diperlukan suatu diagnosa yang benar dan tepat dan diagnosa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat dipastikan tanggal terjadinya, euthanasia memungkinkan hal tersebut terjadi.⁴ Perkembangan akan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang ilmu kedokteran kemudian memunculkan suatu temuan terobosan baru di dalam ilmu kedokteran yang bertujuan pada dasarnya untuk membantu pasien yang dalam hal ini pasien yang sudah benar-benar menderita akan sakit atau penyakitnya, temuan ini kemudian dikenal dengan istilah euthanasia.

Euthanasia merupakan suatu masalah yang menyulitkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter dan tenaga kesehatan yang lain sering kali dihadapkan pada kasus dimana pasien yang menderita suatu penyakit yang penyakitnya tersebut telah menimbulkan suatu penderitaan yang berat pada pasiennya atau bahkan tidak dapat disembuhkan lagi. Masalah seperti ini yang membuat pasien dan pihak keluarga pasien pada akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan tindakan medis. Penghentian tindakan medis tersebut merupakan salah satu bentuk dari euthanasia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ini menimbulkan dampak terhadap nilai-nilai etik/moral, agama, hukum, sosial, budaya dan aspek lainnya. Dokter dalam situasi seperti ini dihadapkan dalam dilema, dalam hal apakah mereka mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup pasien dengan alasan atas permintaan pasien sendiri atau pihak keluarga, tetapi tanpa membuat dokter itu sendiri menghadapi suatu konsekuensi hukum. Euthanasia secara dunia internasional juga telah mendapat perhatian sendiri. Negara di Benua Eropa seperti Belanda telah melegalkan adanya praktek euthanasia, lalu kemudian Belgia, Amerika dan Australia juga sudah mulai mengakui adanya euthanasia. Tentunya semua ini melalui berbagai dan beberapa prosedur, aturan dan persyaratan.

³ Abdussalam, 2010, *HAM Dalam Proses Peradilan*, Jakarta : PTK Press, hlm 7

⁴ Denissa Ningtyas, *Op-cit*

Kehadiran euthanasia sebagai suatu hak asasi manusia berupa hak untuk mati, dianggap sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup, maka setiap orang juga mempunyai hak untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Inilah yang kemudian memunculkan istilah euthanasia.⁵ Euthanasia bila ditinjau dalam perspektif HAM menurut kaum yang kontra dianggap merupakan pelanggaran karena menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi. Euthanasia dianggap melanggar HAM sebab bertentangan dengan hak hidup manusia karena dianggap dengan sengaja memperpendek usia kehidupan seseorang. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi di prakteknya euthanasia menjadi suatu jalan keluar dari suatu masalah yang menyangkut dengan kehidupan manusia dalam hal ini pasien.

Membicarakan euthanasia tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia. Kemajuan-kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia. Namun uniknya, kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat tadi rupanya tidak pernah diikuti oleh perkembangan dalam bidang hukum dan etika⁶.

Meski tidak secara tegas diatur, euthanasia juga dianggap telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya:

"Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."⁷

Secara umum sebenarnya hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang. Hanya, disebutkan bahwa kematian adalah hilangnya nyawa seseorang, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Padahal, dengan kemajuan iptek kedokteran masa kini, detak jantung dan napas seseorang dapat terus dipertahankan karena fungsi otonomnya (dengan bantuan peralatan medis tertentu), walaupun sebenarnya otak atau batang

⁵ Irna Tilamuhu, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia* < <http://irnatilamuhu.blogspot.com/2012/03/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html>>, 2012, diakses tanggal 30 Oktober 2012.

⁶ Haryadi, *Masalah Euthanasia dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/540>, 2011, diakses tanggal 1 November 2012.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm.

otaknya telah berhenti berfungsi. Inilah yang di kalangan kedokteran dikenal sebagai keadaan vegetatif (vegetative state)⁸.

Aturan hukum mengenai euthanasia berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma-norma budaya maupun ketersediaan perawatan atau tindakan medis. Oleh karena sensitifnya isu ini, pembatasan dan prosedur yang jelas harus dapat selalu diterapkan tanpa memandang status hukumnya.

Masalah yang berkaitan dengan euthanasia ini akan terus menjadi suatu perdebatan. Bilamana dilihat dari segi perundang-undangan memang belum adanya pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai euthanasia. Karena masalah euthanasia ini menyangkut dengan soal keselamatan dari jiwa manusia, maka sebaiknya harus dapat dibuat undang-undang atau pengaturan yang jelas mengenai euthanasia. Dalam memandang kasus seperti ini kita memandang dari dua sisi, yaitu pertama, pasien memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempunyai hak untuk menolak perawatan, hal ini merupakan hak dasar yang tercantum di dalam UU HAM dan UU Kesehatan. Kedua, dokter mempunyai kewajiban bahwa di dalam menjalankan hak dan kebebasannya sebagai seorang dokter hendaknya menghormati hak dan kebebasan yang digunakan pasien untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan etik-moral.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kajian hubungan Euthanasia menurut HAM ?
2. Bagaimana pelaksanaan euthanasia ditinjau dari Hukum Nasional Belanda?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, itu melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.¹⁰

Penelitian yang dilakukan ini merupakan termasuk dalam lingkup penelitian pada disiplin Ilmu Hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses

⁸ Word Press, <http://laporanpenelitian.wordpress.com/2008/05/25/euthanasia-antara-legal-dan-non-legal/>, 2008, diakses tanggal 29 Oktober 2012.

⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1.

¹⁰ Ibid, hlm 19

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Tujuan penelitian hukum tidak lebih dari melakukan verifikasi terhadap kebenaran empirik.¹² Morris L. Cohen dalam bukunya "Legal Research" berpendapat bahwa :

*"Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules".*¹³

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, maka diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian hukum ini adalah Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Melakukan penelitian hukum melalui perbandingan hukum. Jerome Hall memberikan patokan mengenai penelitian perbandingan hukum, yakni *"Comparative laws is a composite of social knowledge of positive law, distinguished by the fact that, in its general aspect, it is intermediate between the knowledge of particular laws and legal institutions, on the one side, and the universal knowledge of them at the other extreme"*.¹⁵

Perbandingan hukum senantiasa bertitik tolak pada paradigma teoritis maupun kerangka konseptual.¹⁶ Penelitian perbandingan hukum yang dilakukan adalah dengan membandingkan akan Hukum Positif Indonesia dan yang berlaku di Belanda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup Bahan hukum primer adalah Hukum Nasional Belanda yaitu The Dutch Euthanasia Policy/ Dutch Law on Euthanasia, The Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act)

Hukum Nasional di Indonesia yaitu UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran, KODEKI, KUHP dan DUHAM, ICCPR, Convention of The Right Self Determination, Optional Protocol tentang " The Abolition of The Death Penalty".

¹¹Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35

¹² Ibid, hlm 8

¹³Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 29

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm 13-14.

¹⁵ Ibid, hlm 19.

¹⁶ Ibid, hlm 20.

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teori tentang Hukum dan HAM, jurnal-jurnal umum tentang Euthanasia. Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau obeservasi, dan wawancara atau interview.¹⁷ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, menelaah dengan teliti sumber data dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai kajian euthanasia dari hukum Belanda dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum di Indonesia dan teori - teori hukum dan HAM.

Studi Komparasi (*comparative research*), yakni dengan cara membandingkan teori dengan fakta yang ada, dalam hal ini fakta atau contoh-contoh kasus yang ada baik di Indonesia maupun di Belanda, untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian tentang cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit terlebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.¹⁸

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan mendasarkan pada pola pikir deduktif dan induktif mengenai pelaksanaan euthanasia dan kajian euthanasia dari hukum Belanda yang dikaji secara sistematis dengan dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum di Indonesia yakni UUD 1945, DUHAM, UU Kesehatan dan dihubungkan pula dengan teori-teori hukum dan HAM, dengan tetap berpegang pada kerangka masalah yang ada.

D. PEMBAHASAN

1. Hubungan Euthanasia menurut HAM

Kaitan Euthanasia menurut sudut pandang HAM sudah lama menjadi topik yang menimbulkan banyak pro dan kontra. Euthanasia dianggap telah melanggar dari salah satu HAM yaitu yang berkaitan dengan hak hidup. Seperti sudah dibahas sebelumnya, euthanasia erat kaitannya dengan suatu hak dari seorang pasien/penderita yang ingin mengakhiri kehidupannya atau kemudian banyak pihak yang mengatakan dengan hak mati. Dalam perdebatan eutanasia, definisi yang tidak memadai telah menjadi penghalang nyata untuk menemukan suatu konsensus komunitas yang jelas. Diskusi mengenai eutanasia sering memunculkan emosi yang kuat, hal ini tidak mengerankan karena itu melibatkan masalah anatara hidup dan mati.

Pandangan dari pihak yang kontra atau menentang adanya euthanasia yang didasarkan dari segi hak asasi manusia, mereka bertolak belakang dari

¹⁷ Ibid, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 21.

¹⁸ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 61.

Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang didalamnya telah mencantumkan sejumlah hak-hak asasi manusia. Di dalam DUHAM tersebut diantara sekian banyak hak-hak asasi manusia yang ada didalamnya tidak terdapat mengenai hak untuk mati.

Pandangan atau konsep baru tentang sebutan hak untuk mati merupakan sesuatu hal yang sangat ganjil, sehingga mengundang banyak minat dari para ahli untuk memperbincangkannya. Konsep mengenai hak untuk mati inipun menjadi topik yang menimbulkan banyak pro dan kontra karena hak untuk mati ini dipandang telah tercakup pengertiannya dalam hak untuk hidup yang selama ini telah diketahui secara jelas. Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari aspek hukum euthanasia, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam euthanasia. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidak nyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.¹⁹

Membicarakan euthanasia (*eu* = baik, *thanatos* = mati, mayat), sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia dan karena itulah selalu menarik untuk dibicarakan. Kemajuan-kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia.²⁰ Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam praktek euthanasia menjadi suatu titik fokus sendiri apakah itu melanggar hak asasi manusia atau tidak. Dalam dunia medis yang serba canggih, ternyata masih memerlukan tuntutan etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini erat sekali kaitannya dengan penerapan hak asasi manusia (HAM) di lapangan kedokteran. Sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh pasien (dan juga dokter) dalam kaitan dengan euthanasia, agaknya sudah perlu dipikirkan sejak sekarang.

Kriteria euthanasia yang seperti apa yang kemudian dikategorikan dalam permintaan sendiri, biasanya dalam prakteknya pasien itu sendiri yang meminta, dalam hal ini pasien sudah merasa sekarat dan juga didukung dengan keterangan medis dari pihak dokter yang menyatakan bahwa pasien

¹⁹ Irna Tilamuhu, Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia <<http://irnatilamuhu.blogspot.com/2012/03/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html>>, 2012, diakses tanggal 30 Oktober 2012

²⁰ Haryadi, SH,MH, Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, <<http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/540>>, 2011

sudah tidak dapat sembuh, dalam hal ini pasien yang mengajukan sendiri euthanasia, dalam kasus seperti ini kaitannya dengan HAM adalah pasien tersebut mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Masalah euthanasia yang kemudian dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri kemudian juga menjadi problematika tersendiri dalam hal penentuan konteks pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination) memang tidak disebutkan secara terperinci dalam Universal Declaration of Human Rights, tetapi hak untuk menentukan nasib sendiri ini diatur secara khusus dalam instrumen Hukum Hak Asasi Manusia dalam ICCPR.

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, pada hakekatnya hak ini menjadi bagian bagi hak-hak dasar tertentu, termasuk dalam hal ini hak dari pasien untuk menentukan pilihannya dalam hal pelayanan kesehatannya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan euthanasia. Sehingga ketika seorang pasien pada akhirnya memutuskan untuk meminta mengakhiri kehidupannya dengan cara euthanasia kemudian ini didasarkan pada hak dari pasien tersebut untuk menentukan hidupnya sendiri. Hak seseorang yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kemudian lebih lanjut juga tercantum dalam deklarasi tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Pasal 3 :“Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan dirinya”
- 2) Pasal 9 :“Tak seorangpun boleh ditahan dengan sewenang-wenang...”
- 3) Pasal 12 : “Tak seorangpun boleh diganggu keprivasiannya (privacy) maupun kerahasiaan surat-menyuratnya...”
- 4) Pasal 18 :“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan suara dan kata hatinya...”

Ketentuan mengenai hak-hak dasar individual yang dalam hal ini hubungannya dengan hak untuk menentukan nasib sendiri juga terdapat dalam beberapa ketentuan dalam “International Covenant of Civil and Political Rights”, yakni sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 :“ Setiap orang mempunyai hak menentukan nasib sendiri”
- 2) Pasal 9 :“Setiap orang mempunyai kebebasan dan keamanan dirinya”
- 3) Pasal 17 :“Tak seorangpun boleh dilecehkan keprivasiannya (privacynya) atau kerahasiaan surat-menyuratnya”
- 4) Pasal 18 :“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan suara dan kata hatinya...”

Pasal-pasal diatas pada prinsipnya mengemukakan hak-hak dasar dari manusia yang tidak bisa dilecehkan termasuk hak-hak kepastiannya (privasi) yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun.²¹ Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai konsep dasar hak asasi manusia dimana terfokus pada hak kebebasan dan keamanannya terhadap dirinya sendiri. Konsep hak-hak

²¹ Leenen, 1978, *Rechten van mensen in de gezondheidszorg*, Brussel : Samson Uitgeverij Alphen aan de Rijn, hlm 57

tersebut yang kemudian digunakan untuk mendukung suatu tindakan euthanasia. Hak untuk menentukan nasib sendiri berbicara mengenai kebebasan, keamanan terhadap diri sendiri, namun dalam kaitannya ini seharusnya perlu juga diatur batasan-batasan yang jelas mengenai kebebasan yang seperti apa, haruslah ada aturan yang bisa mengatur dengan lebih jelas konsep hak untuk menentukan nasib sendiri ini. Karena belum adanya batasan-batasan yang lebih jelas maka dalam kasus euthanasia setiap orang atau pasien yang akan melakukan euthanasia menjadikan dasar self determination ini menjadi dasar dari pengambilan keputusan untuk dirinya di euthanasia.

Hak untuk menentukan nasib sendiri dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk euthanasia, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari HAM, maka hubungan euthanasia dengan HAM dipandang dari hak untuk menentukan nasib sendiri ini. Seotang pasien yang sekarat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, ia juga mempunyai hak kebebasan dan rasa aman dan nyaman terhadap dirinya. Euthanasia dipandang dari sudut HAM mungkin dianggap telah melanggar akan hak hidup, namun seorang pasien juga manusia yang mempunyai hak sendiri atas apa yang akan terjadi pada kehidupannya. Pasien tersebut mempunyai hak untuk menentukan nasib hidupnya sendiri. Keputusan untuk melakukan euthanasia merupakan hak dari pasien tersebut untuk meminta sesuatu terhadap keadaan dirinya dan terhadap kehidupannya.

2. Pelaksanaan Euthanasia ditinjau dari Hukum Nasional Belanda

Masalah hak untuk mati melalui jalan euthanasia ini di beberapa negara maju sudah ada pengaturannya di dalam Perundang-undangan negara tersebut, seperti negara Eropa, tetapi hak untuk mati itu tidak bersifat mutlak, seperti adanya keputusan dari Pengadilan Negeri Leeuwarden yang menetapkan tolak ukur perumusan “tidak dikenai hukum” atau “tanpa hukuman” terhadap Euthanasia yang dilakukan. Sedangkan menurut negara Belanda yang pertama kali melegalkan Euthanasia, Euthanasia hanya dapat dilakukan kalau si pasien sendiri yang meminta dan telah memenuhi syarat-syarat untuk dilaksanakannya euthanasia.

Di Negara-negara Eropa secara khusus di negara Belanda dan juga negara Amerika tindakan *euthanasia* mendapatkan tempat tersendiri yang diakui keberadaan dan legalitasnya. Tentunya dalam melakukan tindakan *euthanasia* harus melalui prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar *euthanasia* bisa dilakukan. Di Belanda, euthanasia, yang dibantu dokter untuk melakukan tindakan “bunuh diri”, dan petugas medis lain dalam mengambil tindakan keputusan pengakhiran-hidup telah dibahas selama beberapa dekade dalam profesi medis oleh para spesialis hukum dan etika, baik di depan umum dengan diadakannya debat, dan juga di parlemen

nasional.²² Pemahaman Belanda euthanasia dikatakan ditandai oleh presisi. Tidak seperti negara-negara lain yang membedakan antara euthanasia aktif dan pasif, antara langsung dan euthanasia tidak langsung, dan antara sengaja dan tidak sengaja euthanasia, definisi Belanda istilah ini tepat: yang sengaja mengambil kehidupan seseorang di eksplisitnya permintaan. Menurut hukum, hanya pasien yang kompeten yang permintaan dapat diterima. Hal ini memiliki beberapa konsekuensi.²³ Pertama, apa yang disebut "euthanasia" di Belanda disebut "euthanasia aktif" di bagian lain di dunia. Dalam Konsepsi Belanda, euthanasia adalah dengan definisi aktif dan ada adalah tidak perlu untuk menentukan tindakan dengan istilah "aktif," sebagaimana negara lainnya melakukan.²⁴ Kedua, semua jenis lain akhir-kehidupan-("terminal") perawatan menanggung nama lain. Jadi, misalnya, penghentian pengobatan tidak dianggap euthanasia.

Di tempat lain itu disebut "Euthanasia pasif." Di Belanda, istilah ini dianggap euthanasia pasif sepanjang tidak logis dan tidak berguna adalah kontradiksi-diri karena menyangkut kelalaian pengobatan untuk pasien yang belum menyetujui. Dalam hukum, perbedaan antara akting dan menahan diri dari bertindak tidak memiliki relevansi khusus, dan seperti mengambil pertimbangan hukum lebih diutamakan daripada pengalaman perbedaan segi psikologis.²⁵ Ketiga, tidak diinginkan memperpendek hidup dalam perjalanan pengobatan untuk mengurangi penderitaan dipandang dalam diskusi Belanda sebagai tugas seorang dokter untuk mengurangi rasa sakit. Beberapa istilah ini sebagai "Euthanasia tidak langsung," dan lain-lain melihatnya sebagai datang dalam "Doktrin efek ganda."Kemungkinan bahwa sakit parah Pasien mungkin mati sebagai akibat dari pengobatan tersebut tidak merupakan mati ringan. Keempat, keputusan untuk mengakhiri hidup tanpa eksplisit permintaan secara hukum tidak disebut euthanasia.

Hal ini dianggap membunuh seseorang, meskipun beberapa dokter akan tidak setuju. Euthanasia Involuntary dianggap sebagai kontradiksi dalam hal.²⁶ Kelima, perbedaan antara euthanasia dan physicianassisted bunuh diri hampir tokoh dalam diskusi Belanda. Meskipun bunuh diri yang dibantu dianggap sebagai kejahatan oleh hukum dan perbedaan dapat dilihat sebagai moral yang relevan, relevansi telah dikaitkan dengan perbedaan ini dalam aktual medis konteks kasus euthanasia yang memiliki telah dibawa ke

²² Bridge D. Onwuteaka-Philipsen, Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995, and 2001, <http://image.thelancet.com/extras/03art3297web.pdf> , June 2003, diakses tanggal 25 Februari 2013.

²³ Raphael Cohen-Almagor, Why the Netherlands?, American Society of Law Medicine & Ethics : Journal of Law, Medicine & Ethics, 2002, pg. 95

²⁴ ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

pengadilan. Dalam kedua praktek, dokter harus memenuhi persyaratan substantif dan prosedural yang sama.²⁷

Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya. Tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal.²⁸

Sebuah karangan berjudul "*The Slippery Slope of Dutch Euthanasia*" dalam majalah *Human Life International Special Report* Nomor 67, November 1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan melakukan euthanasia dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan.²⁹ Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang Belanda, dimana seorang dokter yang melakukan euthanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum.³⁰

Di Belanda, euthanasia menjadi jalan menuju ke arah deskriminalisasi pada tahun 1973. Perkembangan tersebut diikuti dengan adanya jajak pendapat yang menunjukkan kenaikan dari 40% pada tahun 1966 kemudian meningkat menjadi lebih dari 70% dukungan dan terus berlanjut sejak tahun 1990.³¹ Pengadilan Leeuwaden menemukan bahwa dokter dapat terlindung dari tanggung jawab pidana ketika persyaratan substantif dan prosedural telah terpenuhi.³² Mahkamah Agung membuat keputusan pengadilan yang paling penting tentang masalah ini yaitu pada tahun 1984 ketika menerima

²⁷ ibid

²⁸ Fatmanadia, *Pandangan Etika dan Perundang-Undangan Tentang Euthanasia*, <http://fatmanadia.wordpress.com/2012/09/02/pandangan-etika-dan-perundang-undangan-tentang-euthanasia/>, 2 September 2012, diakses tanggal 20 Februari 2013

²⁹ ibid

³⁰ ibid

³¹ Francis Pakes, 2005, *Under Siege : The Global Fate of Euthanasia and Assisted Suicide Legislation*, *Eur.J.Crime Cr.L.Cr.J.*, pg 199

³² Henk Leenen, 2001, *The Development of Euthanasia in the Netherlands*, *Eur.J.Health Law*, pg 125

pemutusan kehidupan atas permintaan eksplisit yang telah memenuhi kriteria tertentu.³³

Sebuah langkah besar diambil pada tahun 1990 atas nama dokter berlatih euthanasia. Meminta untuk persetujuan dan kerjasama dari Royal Dutch Medical Association dengan Studi Remmelink, Departemen Kehakiman tidak hanya berjanji hukum kekebalan terhadap dokter yang berpartisipasi dalam nasional investigasi, tetapi juga sepakat untuk memproklamirkan notifikasi prosedur yang mencakup unsur-unsur berikut :

- a. para dokter melakukan euthanasia tidak akan perlu mengeluarkan deklarasi kematian yang alami, tapi akan menginformasikan pemeriksa medis setempat melalui sebuah kuesioner yang luas;
- b. pemeriksa medis akan melaporkan kepada pengacara setempat;
- c. penuntut umum akan memutuskan apakah penuntutan harus dimulai. Sebagai aturan umum, jika dokter telah memenuhi persyaratan untuk euthanasia, ia tidak akan diadili.³⁴

Prosedur pemberitahuan diberikan suatu hukum formal. Status oleh hukum acara yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni, 1994. Menurut hukum ini, dokter melakukan euthanasia sesuai dengan kriteria yang telah dikembangkan dalam etika kasus hukum dan medis tidak akan, sebagai aturan umum, menjadi teradili atau terpidana.³⁵ Pada tanggal 28 November 2000, Majelis Parlemen Rendah Belanda, dengan suara dari 104 sampai 40, menyetujui legalisasi euthanasia. Pada tanggal 10 April 2001. Majelis Parlemen Tinggi Belanda memilih untuk melegalkan euthanasia, membuat Belanda satu-satunya negara pertama dan saat ini di dunia untuk melegalkan euthanasia. Senat memberikan suara 46-28 (dengan satu tidak hadir anggota) yang mendukung Pemutusan Hidup di Permintaan dan Bantuan dengan UU bunuh diri.³⁶ Keputusan dari Mahkamah Agung tersebut dengan demikian telah memberikan jalan yang mulus untuk praktek euthanasia di Negara Eropa yang lebih dikenal karena toleransi dan sosial progresif.³⁷ Sebelum adanya amandemen legislatif, kesepakatan yang didapat antara Menteri Kehakiman dan Royal Dutch Medical Association adalah untuk tidak menuntut dokter asalkan mereka memenuhi prosedur notifikasi yang telah

³³ Leenen, 126, 127 *Criteria: 1. a free explicit and well-considered request by the patient himself; 2. Unbearable suffering and a hopeless situation without prospect of improvement; 3. no reasonable alternative available to alleviate the suffering; 4. the euthanasia is administered by a doctor; 5. the doctor has consulted another competent and independent doctor*

³⁴ Cohen, 97

³⁵ Ibid

³⁶ ibid

³⁷ J. Lucy Pridgeon, 2006, *Euthanasia Legislation in the Europeasn Union: is a Universal Law Possible?*, Canada: University of British Columbia, pg 52

disepakati.³⁸ Pengadilan akan memungkinkan euthanasia selama persyaratan terpenuhi. Ada beberapa potensi lokal yang memungkinkan perlindungan dokter, namun Mahkamah Agung memilih sesuai dibawah dengan kebutuhan.³⁹

Di Belanda, kebutuhan yang disebut dengan tekanan memungkinkan pelanggaran hukum dalam kasus-kasus darurat, tekanan-tekanan yang berat atau tugas yang bertentangan. Euthanasia termasuk dalam hal yang bertentangan untuk profesi dokter karena antara kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kehidupan dan kewajiban untuk mengakhiri sebuah tekanan, penderitaan yang tanpa ada lagi harapan.⁴⁰ Peraturan baru membuat hukum untuk mengakhiri hidup pasien, tunduk pada kriteria sebagai berikut: pasien harus menderita tak tertahankan dan tak henti-hentinya merasa sakit, dengan prospek tidak ada perbaikan. Pasien harus membuat, berkelanjutan informasi, dan permintaan sukarela untuk bantuan untuk mati. Semua pilihan medis lainnya harus sebelumnya telah habis. Pendapat medis kedua harus berusaha untuk mengkonfirmasi diagnosis dan prognosis.

Penghentian hidup, maka harus dilakukan keluar dengan perawatan medis yang tepat dan perhatian. Dokter wajib melaporkan kematian ke kota patolog, menentukan apakah penyebab kematian adalah euthanasia atau bunuh diri yang dibantu.⁴¹ Hukum Belanda mengintegrasikan otonomi pasien dalam perawatan medis dengan menciptakan standar perawatan untuk dokter. Diantara banyak persyaratan, prosedur haruslah berlangsung sukarela dan pasien harus telah diberitahu dan menolak segala kemungkinan adanya pengobatan alternatif medis.⁴² Ciri utama dari sikap politik pendukung euthanasia terhadap undang-undang euthanasia di Belanda adalah relatif kurangnya kontroversi dari dalam negeri pada saat diberlakukannya.

Di negara-negara lain, ada sejumlah ketidaknyamanan, namun Organisasi Royal Belanda Medis tidak menawarkan pesan oposisi yang kuat dan juga hal yang sama terjadi dari mayoritas masyarakat di Belanda.⁴³ Hal ini mungkin disebabkan sebagian faktor bahwa euthanasia telah dipraktekkan di Belanda yang relatif terbuka sejak keputusannya pada tahun 1973. Hal ini juga karena kurangnya suara dari bagian religius yang kuat dari pihak oposisi. Hal-hal ini sangat penting dalam menjelaskan bagaimana rancangan undang-

³⁸Robert Lynn, 2004, 'Ending Life' in Grubb, A. and Laing, Y. (eds.) *Principles of Medical Law*, 2nd ed, New York : Oxford University Press, pg. 1131

³⁹ Leenen, 126

⁴⁰ ibid

⁴¹ Reuters, Dutch Parliament Votes to Legalize Euthanasia, <http://www.worldrtd.org/dutchlaw.html#reuters>, November 28, 2000

⁴²Grubb, Andrew, 1997, 'Euthanasia in England — A Law Lacking Compassion?', Oxford: Clarendon Press, 1132

⁴³ Pakes, 131

undang (RUU) euthanasia menjadi berhasil dan mengapa hal itu tidak menghadapi serangan terus menerus.⁴⁴

E. PENUTUP

Euthanasia merupakan bukan suatu temuan yang baru di bidang medis tetapi hingga saat ini masih terus menjadi suatu perbincangan yang menimbulkan pro dan kontra. Euthanasia dianggap telah melanggar salah satu aspek dari Hak Asasi Manusia yaitu mengenai hak hidup, namun di sisi yang lain euthanasia dianggap berhak untuk didapatkan oleh manusia sebagai hak dari untuk menentukan nasibnya sendiri, dan merupakan hak kebebasan.

Kontroversi yang terjadi terhadap euthanasia ini membuat dampak terhadap pengesahan akan praktek euthanasia, dan ini bukan hanya terjadi di negara Indonesia tapi di beberapa negara di Eropa juga. Namun, negara Belanda menjadi negara pertama yang berani untuk mengambil keputusan untuk melegalkan akan praktek euthanasia, dengan diikuti dengan prosedur-prosedur yang tepat. Pengalaman Belanda telah mempengaruhi perdebatan tentang euthanasia dan kematian dengan martabat di seluruh dunia, khususnya yang berkaitan dengan apakah perbuatan euthanasia ini dibantu oleh dokter untuk bunuh diri dan apakah euthanasia memang harus dilegitimasi atau disahkan.

Tinjauan literatur mengungkapkan kompleks dan sering terjadi kontradiktif pandangan tentang pengalaman Belanda. Beberapa menyatakan bahwa Belanda menawarkan sebuah model bagi dunia untuk mengikutim sedangkan di pihak yang lain percaya bahwa Belanda merupakan suatu bahaya atau mendatangkan ancaman yang baru, bukan daripada membawa sebuah janji atau kepastian, dan bahwa pengalaman Belanda adalah definitif menjawab tentang mengapa kita tidak harus membuat euthanasia aktif dan membuat dokter menjadi bantuan untuk melakukan “pengakhiran hidup” menjadi bagian dari kehidupan kita.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdussalam. *HAM Dalam Proses Peradilan*, Jakarta : PTIK Press, 2010
Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
Cohen-Almagor, Raphael. *Why the Netherlands?*, USA: American Society of Law Medicine & Ethics : Journal of Law, Medicine & Ethics, 2002
Grubb, Andrew , 1997, *'Euthanasia in England — A Law Lacking Compassion?'*, Oxford: Claredon Press

⁴⁴ Pridgeon, 52

- Leenen. *Rechten van mensen in de gezondheidszorg*, Brussel : Samson Uitgeverij Alphen aan de Rijn, 1978
- Leenen, Henk, *The Development of Euthanasia in the Netherlands*, Eur.J.Health Law, 2001
- Lynn, Robert, 2004, 'Ending Life' in Grubb, A. and Laing, Y. (eds.) *Principles of Medical Law*, 2nd ed, New York : Oxford University Press
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2010
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Pakes, Francin, *Under Siege : The Global Fate of Euthanasia and Assisted Suicide Legislation*, Eur.J.Crime Cr.L.Cr.J, 2005
- Pridgeon, J. Lucy, 2006, *Euthanasia Legislation in the European Union: is a Universal Law Possible?*, Canada: University of British Columbia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Jakarta: Graha Ilmu Indonesia, 1977

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- The Dutch Euthanasia Policy/ Dutch Law on Euthanasia,
The Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act
UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM
UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
UU No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran
KODEKI
KUHP
DUHAM
ICCPR
Convention of The Right Self Determination
Optional Protocol tentang " The Abolition of The Death Penalty"

Sumber Lainnya

- Bridge D. Onwuteaka-Philipsen, *Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995, and 2001*, <http://image.thelancet.com/extras/03art3297web.pdf> , June 2003, diakses tanggal 25 Februari 2013
- Denissa Ningtyas, *Euthanasia*, <
<http://www.slideshare.net/densyaa/euthanesia>>, 22 April 2012, diakses tanggal 28 Oktober 2012.
- Fatmanadia, *Pandangan Etika dan Perundang-Undangan Tentang Euthanasia*,

- <<http://fatmanadia.wordpress.com/2012/09/02/pandangan-etika-dan-perundang-undangan-tentang-euthanasia/>>, 2 September 2012, diakses tanggal 20 Februari 2013
- Haryadi, *Masalah Euthanasia dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/540>, 2011, diakses tanggal 1 November 2012
- Irna Tilamuhu, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia* <<http://irnatilamuhu.blogspot.com/2012/03/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html>>, 14 Maret 2012, diakses tanggal 30 Oktober 2012
- The Netherlands Ministry of Foreigns Affairs , <http://www.patientsrightscouncil.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Netherlands_Ministry_of_Justice_FAQ_Euthanasia_2010.pdf>, 2010
- Random House, <http://johnkoplo.wordpress.com/2008/05/>, diakses tanggal 20 November 2012
- Reuters, *Dutch Parliament Votes to Legalize Euthanasia*, <http://www.worldrtd.org/dutchlaw.html#reuters>, November 28, 2000
- Word Press, <http://laporanpenelitian.wordpress.com/2008/05/25/euthanasia-antara-legal-dan-non-legal/>, 25 Mei 2008, diakses tanggal 29 Oktober 2012.